

[https://farid.ps/articles/trumps\\_lawless\\_aggression\\_against\\_iran\\_and\\_the\\_case\\_for\\_his\\_ren](https://farid.ps/articles/trumps_lawless_aggression_against_iran_and_the_case_for_his_ren)

# **Agresi Ilegal Trump terhadap Iran dan Alasan untuk Pemecatannya**

Apa yang terjadi ketika seorang presiden AS menentang kepentingan negaranya, mengabaikan kewajiban hukum, dan mengundang bencana global? Esai ini mengungkap pemboman fasilitas nuklir Iran oleh Donald Trump pada 21 Juni 2025 sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, yang melayani agenda Israel sambil melumpuhkan ekonomi AS dan mendorong dunia menuju Perang Dunia III. Esai ini merinci implikasi hukum dan ekonomi, menyatakan bahwa kegagalan Trump untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memerintahkan persiapan militer adalah pengkhianatan terhadap sumpahnya, menuntut pemecatannya segera melalui pemakzulan atau Amandemen ke-25, mengutuk negara-negara Eropa atas keterlibatan mereka, memuji kedamaian historis Iran, dan menyerukan permintaan maaf serta akuntabilitas PBB.

## **Prioritas Trump pada Kepentingan Israel di Atas Prioritas Amerika**

Keputusan Trump untuk membom situs nuklir Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan—pada 21 Juni 2025 sejalan dengan tujuan Israel untuk menetralkan program nuklir Iran, mengabaikan kepentingan keamanan dan ekonomi Amerika. Serangan Israel pada 13 Juni 2025 memicu pembalasan Iran, dan eskalasi Trump, dengan bergabung dalam perang Israel, melibatkan AS dalam konflik tanpa manfaat yang jelas. Hanya 25% warga Amerika mendukung serangan tersebut, mencerminkan penolakan publik terhadap keterlibatan asing ini. Dengan melayani agenda Israel, Trump mengabaikan peringatan dari Rusia, Yaman, dan Pakistan, mempertaruhkan nyawa dan sumber daya Amerika untuk tujuan yang melemahkan kedaulatan nasional.

## **Dampak Ekonomi dari Gangguan Rute Pelayaran Mediterania**

Serangan AS telah mengacaukan rute pelayaran Mediterania, yang sangat penting untuk perdagangan Amerika dengan Eropa dan Timur Tengah. Ancaman Iran untuk membalsas dan peringatan Yaman untuk menargetkan kapal-kapal AS di Laut Merah telah meningkatkan risiko maritim, secara efektif menutup rute-rute ini untuk perusahaan-perusahaan AS. Gangguan ini menyebabkan biaya pengiriman melonjak, memicu inflasi, dan mengancam bisnis, terutama perusahaan kecil yang bergantung pada rantai pasok yang stabil. Kerusakan ekonomi, akibat langsung dari agresi Trump, memprioritaskan konflik asing di atas kemakmuran Amerika, menyebabkan kerugian yang ditimbulkan sendiri pada ekonomi AS.

# **Pelanggaran Hukum Domestik dan Internasional**

Pemboman fasilitas nuklir Iran melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam pembelaan diri. Tidak ada bukti ancaman Iran yang segera, dan negara-negara seperti Kuba dan Chili telah mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan ilegal. Menargetkan situs nuklir berisiko menyebabkan kontaminasi radioaktif dan kerusakan ekologis, membahayakan warga sipil, meskipun tidak ada laporan pelepasan besar.

Secara domestik, Trump melanggar kewajiban konstitusionalnya berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, yang mewajibkan pemberitahuan kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah mengerahkan pasukan ke dalam perrusuhan atau perrusuhan yang akan segera terjadi. Tindakan persiapan—memerintahkan USS Nimitz pada 14 Juni 2025 pukul 00:00 UTC, pesawat tanker pada 15 Juni 2025 pukul 00:00 UTC, dan pembom B-2 pada 21 Juni 2025 pukul 06:00 UTC—jelas menunjukkan rencana untuk serangan, yang memerlukan pemberitahuan dalam waktu 48 jam setelah setiap perintah (misalnya, sebelum 16 Juni 2025 pukul 00:00 UTC untuk Nimitz). Kegagalan Trump untuk memberi tahu Kongres, meskipun tindakan ini memungkinkan serangan pada 21 Juni, adalah pengkhianatan terhadap sumpahnya, seperti yang dinyatakan oleh anggota parlemen seperti Senator Tim Kaine dan Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez, yang menuntut akuntabilitas.

## **Ancaman terhadap Perdamaian Global dan Risiko Perang Dunia III**

Agresi Trump mengancam perdamaian dunia, mendorong Timur Tengah menuju konflik yang lebih luas dengan dampak global. Dengan menyerang Iran, AS telah memicu hak Iran untuk pembelaan diri berdasarkan Pasal 51, yang berpotensi menarik Yaman, Pakistan, dan Rusia ke dalam konflik. Peringatan dari negara-negara ini menandakan risiko koalisi yang menentang AS dan Israel, dengan keterlibatan Rusia dan Tiongkok berpotensi mengglobalisasi konflik. Penempatan pembom B-2, yang mampu membawa muatan nuklir, meningkatkan risiko kesalahan perhitungan, membawa umat manusia lebih dekat ke Perang Dunia III. Penolakan Trump terhadap diplomasi melemahkan stabilitas global, memerlukan tindakan mendesak untuk menghentikan jalur berbahaya ini.

## **Kebutuhan Mendesak untuk Pemecatan Trump**

Tindakan ilegal Trump dan kegagalannya untuk memberi tahu Kongres tentang persiapan militer membenarkan pemecatannya segera melalui pemakzulan atau Amandemen ke-25. Pemakzulan dibenarkan oleh pelanggarannya terhadap Undang-Undang Kekuatan Perang dan membahayakan keamanan global, dengan seruan bipartisan untuk akuntabilitas yang semakin meningkat. Amandemen ke-25, yang memungkinkan Wakil Presiden dan Kabinet untuk menyatakan Trump tidak layak, adalah opsi yang layak mengingat prioritasnya yang sembrono terhadap Israel di atas Amerika dan pengabaian terhadap kewajiban hukum.

Kegagalan untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memerintahkan persiapan—yang terlihat jelas dalam penempatan dari 14 hingga 21 Juni—menunjukkan pengkhianatan terhadap sumpahnya, menuntut pemecatan cepat untuk mencegah bencana lebih lanjut.

## **Kecaman atas Keterlibatan Eropa**

Spanyol, Skotlandia, Inggris, Yunani, Jerman, dan Italia, dengan menampung pesawat tanker AS di pangkalan seperti RAF Fairford dan Ramstein, adalah kaki tangan dalam agresi ilegal ini. Pesawat-pesawat ini, yang dikerahkan pada 15 Juni 2025 pukul 00:00 UTC, memungkinkan serangan pembom B-2, melibatkan negara-negara ini dalam pelanggaran Pasal 2(4). Kegagalan mereka untuk menjaga netralitas dan hukum internasional patut dicela, melemahkan posisi moral mereka sebagai pendukung perdamaian. Negara-negara Eropa ini harus menghadapi kecaman terberat karena memungkinkan perang yang mengancam stabilitas global.

## **Kedamaian Historis Iran**

Iran telah menjadi mercusuar perdamaian selama berabad-abad, menghindari perang agresi sejak era Safavid. Fokusnya setelah tahun 1979 pada kedaulatan dan perlawanan terhadap campur tangan asing, seperti yang terlihat dalam Perang Iran-Irak, mencerminkan ambisi defensif. Program nuklir Iran, yang dipantau oleh IAEA, digambarkan sebagai damai, tanpa bukti definitif tentang persenjataan. Serangan AS dan Israel adalah serangan tidak adil terhadap sebuah negara yang telah mencari solusi diplomatik, layak mendapatkan penghormatan atas pengendalian diri dan kontribusi regionalnya.

## **Tuntutan untuk Permintaan Maaf dan Akuntabilitas PBB**

Israel, AS, dan negara-negara Eropa yang terlibat harus mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada Iran atas serangan ilegal mereka, yang melanggar kedaulatan dan mempertaruhkan kerusakan katastrofis. AS harus melepas hak veto di Dewan Keamanan PBB, yang sering digunakan untuk melindungi diri sendiri dan Israel, untuk memungkinkan resolusi yang mengutuk serangan tersebut. Resolusi seperti itu, yang didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Chili, akan menegaskan kembali Piagam PBB dan memulihkan kepercayaan pada hukum internasional, yang telah melemah sejak eskalasi konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023.

## **Kesimpulan**

Serangan ilegal Trump terhadap Iran, yang melayani kepentingan Israel, telah melumpuhkan ekonomi AS, melanggar hukum nasional dan internasional, dan membahayakan warga sipil dan ekologi. Kegagalan untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memerintahkan persiapan militer mengkhianati sumpahnya, menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dunia dan mempertaruhkan Perang Dunia III. Pemecatannya segera melalui pemakzulan atau Amandemen ke-25 adalah

keharusan. Keterlibatan negara-negara Eropa menuntut kecaman tegas. Iran, sebuah negara yang secara historis damai, berhak atas permintaan maaf, dan AS harus mengizinkan resolusi PBB untuk meminta pertanggungjawaban. Hanya melalui langkah-langkah ini dunia dapat menghindari bencana dan memulihkan keadilan.